

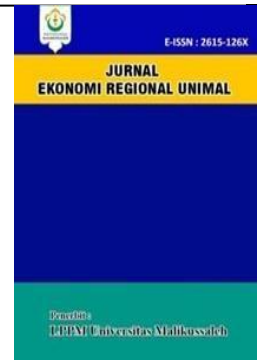
ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN DAERAH, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA SUBSIDI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL ARDL

^aSonia Santa Mahdalena^bIchsan

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMalikussaleh

aCorrespondingauthor:: sonia.190430100@mhs.unimal.ac.id

*^bbjchsan@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords: *Economic Growth, Regional Financing, Unexpected Expenditure, Subsidy Expenditure.*

This study aims to analyze the effect of Regional Financing, Unexpected Expenditures, and Subsidy Expenditures on economic growth in Indonesia. The data used is secondary data for 1990-2021 accessed from the Indonesia's Central Bureau of Statistics and the World Bank. The data analysis method used is Autoregressive Distributed Lag (ARDL) using Eviews 10 software. The results of this study indicate that in the estimation of the ARDL model, in the short term Regional Financing and Unexpected Expenditures are not detected. In the short term at lag 0, Lag 1, and Lag 2 Subsidy spending has a negative and significant effect on economic growth in Indonesia. Meanwhile, in lag 3 Subsidy Spending has a positive and significant effect on economic growth in Indonesia in the current year. In the long term Subsidy Expenditures do not have a significant effect on economic growth in Indonesia. Based on the results of this study, it is suggested that the government conduct better management of subsidy spending so that it is right on target, so that it can encourage more optimal economic growth.

1. PENDAHULUAN

Jhingan (2013) berpendapat pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi kepada masyarakat. Kenaikan kapasitas ini dimungkinkan oleh adanya kemajuan ataupun penyesuaian teknologi, Pertumbuhan ekonomi modern menekankan pentingnya pembentukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik juga perekonomian. Investasi tidak hanya berpengaruh pada permintaan agregat, namun juga terhadap penawaran agregat. Pertumbuhan ekonomi tekanannya pada tiga aspek, yakni proses output perkapita jangka panjang, perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu dapat dilihat melalui aspek dinamis perekonomian (Sularso, 2011).

Kemajuan perekonomian suatu negara tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya

manusia (SDM), akumulasi modal, organisasi produksi, teknologi, pembagian kerja, dan perluasan skala produksi. Namun, di dalam perekonomian modern pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, dan juga pemerintah mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun rumah tangga (Hidayat, 2010).

Dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan daripajak. Secara aturan, pemerintah dapat melakukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah

melalui pengeluaran pemerintah (Juanda & Heriwibowo, 2016).

Juanda (2016) menyatakan pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomihadir menjadi masalah ekonomi kebijakan pengeluaran pemerintahlah yang menjadi tolak ukur tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baikdalam menolong perekonomian masyarakat, seperti halnya pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi untuk menambah output, permintaan, dan produktivitas serta menjaga stabilitasperekonomian, khususnya stabilitas harga. Keynes dalam Muhammed (2014), beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat 1 s.d. 5). Dalam PP No. 12 Tahun 2019 pasal 56 ayat (1), disebutkan bahwa belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam PP No. 12 tahun 2019 pasal 27 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hubungan pembiayaan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan daerah diharapkan dapat memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi negara. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya semakin kecil pengeluaran pemerintah maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2020 mendefinisikan belanja tidak terduga sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Pemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam proses peningkatan kegiatan kehidupan ekonomi suatu negara. Spencer (2000) berpendapat, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara singkatnya, subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan. Subsidi juga dapat diterapkan dalam perdagangan antar negara internasional.

Peran pemerintah dalam perekonomian dilakukan melalui aktivitas ekonomi dengan menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas harga untuk mendorong daya beli masyarakat atas kegiatan bisnis untuk mengontrol inflasi. Subsidi tidak hanya sekedar meningkatkan anggaran yang memberatkan defisit anggaran, namun juga memberikan efek positif dan menghasilkan dampak yang maksimal (Widyatama, 2022).

Masyarakat penerima subsidi diharapkan mampu memanfaatkan subsidi sebagai jembatan untuk meningkatkan produktivitas sehingga tercipta ketahanan ekonomi yang lebih baik. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan subsidi untuk menjaga ketahanan ekonominya dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu inovasi dalam menjalankan roda perekonomian dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada melalui subsidi yang digulirkan karena dalam aktivitas ekonomi subsidi menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian negara.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yaitu pengadaan anggaran untuk pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun besaran pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan daerah, belanja tidak terduga, belanja subsidi serta pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1990-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Daerah, Belanja Tidak Terduga, Belanja Subsidi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021

Tahun	PE (Persen)	PD (MiliarRp)	BTT (MiliarRp)	BS (MiliarRp)
2012	6,03	92,035	99,999	53,763
2013	5,55	112,053	99,999	70,793
2014	5,02	115,551	71,049	62,851
2015	4,87	144,192	62,190	142,576
2016	5,03	85,183	52,743	174,227
2017	5,06	72,511	74,650	166,401
2018	5,17	107,124	75,911	216,883
2019	5,01	122,710	86,911	201,803
2020	-2,06	101,091	367,005	196,231
2021	3,69	98,041	87,206	242,082

Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi tidak konstan. Namun, pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2021 tingkat tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 8,22 persen menurut (BPS) peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang kuat.

Tahun 2020, merupakan tahun terendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar -2,06 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Covid-19 menyebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan *lockdown*, bencana tersebut menghempaskan prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkembangan pembiayaan daerah Indonesia pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuatif, tahun 2012 sampai 2015 pembiayaan daerah cenderung meningkat. Tahun 2012 tercatat sebesar Rp92,035 triliun dan tahun 2015 tercatat sebesar Rp144,192 triliun, tahun 2015 merupakan tahun tertinggi pembiayaan daerah hal ini disebabkan karena penyerapan belanja daerah yang kurang maksimal. Namun, dua tahun selanjutnya pembiayaan daerah mengalami penurunan. Tahun 2016 pembiayaan daerah Indonesia tercatat sebesar Rp85,183 triliun dan tahun 2017 tercatat sebesar Rp72,511 triliun,

tahun 2017 menjadi tahun terendah pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2021.

Belanja tidak terduga setiap tahun mengalami fluktuatif yang tidak konstan. Dalam waktu 10 tahun dari tahun 2012-2021, tahun 2020 merupakan tahun peningkatan tertinggi belanja tidak terduga tercatat sebesar Rp367,005 triliun. Menurut (BPS, 2022) peningkatan belanja tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan atas postur dan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja Negara akibat bencana non alam yaitu Covid-19, bencana non alam tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk penanganan dan penanggulangan bencana Covid-19. Perkembangan belanja tidak terduga terendah terjadi pada tahun 2016 tercatat sejumlah Rp52,745 triliun, hal ini diakibatkan karena rendahnya penanggulangan tidak terduga baik bencana alam maupun bencana non alam.

Dalam kurun waktu 10 tahun belanja subsidi Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2012-2021, tahun 2021 merupakan tahun peningkatan belanja subsidi tertinggi selama 10 tahun dengan jumlah sebesar Rp242,082 triliun, Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan belanja subsidi. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi pandemi Covid-19.

Sejauh ini telah dilakukan sejumlah penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dikaitkan dengan pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi. Penelitian yang dilakukan Ihsan (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan Bachtiar (2014) menunjukkan bahwa belanja subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Alsahrani & Alsadiq (2014) menunjukkan bahwa belanja subsidi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi.

Penelitian Wahyudi (2020) menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Thoyib & fithri (2022) menunjukkan pengeluaran tak terduga memiliki pengaruh positif dan substansial signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda menyangkut pengaruh pembiayaan

daerah, belanja tidak terduga, dan belanja subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990-2021.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang umumnya menggunakan metode regresi linier berganda dan VECM, penelitian ini menggunakan metode analisis data *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Keunggulan dari metode ARDL yaitu dapat diperoleh estimasi jangka pendek dan estimasi jangka panjang secara serentak.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2012), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan dan penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada dan diukur dengan menggunakan nilai Product Domestic Bruto (PDB).

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar pembiayaan memiliki fungsi sebagai peningkatan *utility* (daya guna) dari modal/uang, meningkatkan daya guna suatu barang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, dan sebagai stabilisasi ekonomi (Rivai & Veithzal, 2008).

Belanja Tidak Terduga

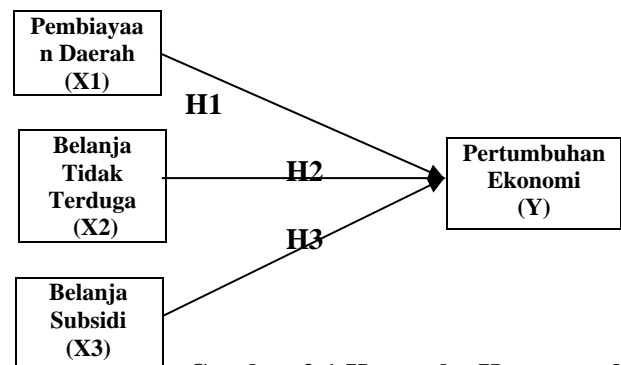
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2020 mendefinisikan belanja tidak terduga sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Subsidi

Subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan maupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima (Spencer, 2000).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori dan penelitian-penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual dari penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada gambar di atas menjelaskan bagaimana pengaruh pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis

Sesuai topik permasalahan dan tujuan adanya kajian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga pembiayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam pendek dan jangka panjang.
- H2: Diduga belanja tidak terduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- H3: Diduga belanja subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi. Lokasi penelitian ini di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series*

(runtun waktu). Data *time series* adalah data yang secara kronologis menurut waktu digunakan untuk melihat pengaruh dalam rentang waktu tertentu (Kuncoro, 2007). Jumlah data penelitian ini adalah dari tahun 1990-2021.

Data pertumbuhan ekonomi, pembiayaan daerah, belanja tidak terduga dan belanja subsidi sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 1990-2021.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun penjelasan masing-masing variabel di jelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diperoleh dari pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK yang diukur dengan satuan persen.

2. Pembiayaan Daerah (X1)

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang diukur dalam satuan rupiah.

3. Belanja Tidak Terduga (X2)

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBN untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang diukur dalam satuan rupiah.

4. Belanja Subsidi (X3)

Belanja subsidi merupakan anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada masyarakat, yayasan, lembaga atau bisnis yang umumnya berasal dari pemerintah dengan maksud membantu biaya produksi agar harga jual suatu barang dan jasa dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum, yang diukur dalam satuan rupiah.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model ARDL, model ARDL adalah bentuk metode ekonometrika yang

dapat mengestimasi model *Autoregressive Distributed Lag* dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi diantara variabel-variabel yang diestimasi. Metode ARDL memiliki beberapa kelebihan dalam operasionalnya bisa menggunakan data yang lebih sedikit dan tidak membutuhkan klasifikasi variabel sehingga dapat dilakukan pada variabel I(0), I(1) maupun kombinasi keduanya dan juga pada model ARDL bisa melihat pengaruh variabel Y dan X dari waktu ke waktu, berikut juga pengaruh masa lampau terhadap masa kini.

Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menguji stasioneritas data
2. Penentuan lag optimum
3. Uji kointegrasi
4. Asumsi Klasik
 - Uji autokorelasi
 - Uji hetroskedastisitas
5. Uji Stabilitas Model ARDL
6. Estimasi Model ARDL

Uji Stasioneritas Data

Dalam model dinamis uji stasionaritas sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya *regresi lancung* (*spurious regression*) dalam mengestimasi sebuah model. Uji stasionaritas sering disebut dengan uji unit *root test*. Dalam melakukan pengujian Uji unit *root test* dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya adalah *Augmented Dickey Fuller* dan *Philips Perron*. Keduanya mengidentifikasi keberadaan unit *root test* sebagai hipotesis null. Penelitian ini, uji unit *root test* akan menggunakan metode *Philips Perron* (PP). pengujian dengan metode *Philips-Perron* (PP) merupakan pengembangan pada *Dickey Fuller* (DF) dengan memperbolehkan asumsi adanya distribusi *error*, tahap pertama dalam penggunaan metode ARDL dalam penelitian ialah seluruh variabel harus stasioner pada *first difference*. Data stasioner pada tingkat level dan *second difference* tidak cocok untuk model ARDL. Jika seluruh variabel sudah stasioner pada tingkat *first difference* maka model ARDL dalam penelitian layak diterapkan (Gujarati, 2012).

Penentuan Lag Optimum

Menentukan lag dalam model ARDL sangat penting dan jika lag yang ditentukan terlalu kecil, model tidak akan secara

akurat memperkirakan kesalahan yang sebenarnya dan tidak akan dapat memperkirakan kesalahan standar dengan benar. Di sisi lain, jika lag yang ditentukan terlalu banyak, derajat kebebasan berkurang. Penentuan lag optimum dapat ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria yang ditentukan oleh *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SIC), *HannanQuin Information Criterion* (HQ), dan *Likelihood Ratio* (LR). Dalam penelitian ini, penentuan panjang lag akan dilihat melalui *Akaike Information Criterion* (AIC) (Gujarati, 2012).

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi yang digunakan adalah uji kointegrasi *Bound Test*, uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang tidak stasioner pada data level terkointegrasi antara satu variabel dengan variabel-variabel yang tidak stasioner menghasilkan variabel yang stasioner (Sopiana, 2012). Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

Maka, error dari persamaan tersebut dapat ditulis menjadi:

$$e_t = y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t$$

Dimana:

β_0 : Konstan

β_1 : Koefisien model ARDL

e_t : Nilai residual waktu

y_t : Variabel Terikat

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (2012), autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut waktu (*Data time series*) dan menurut ruang (*data cross-section*). Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana faktor kesalahan pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor kesalahan pada periode lainnya. Pada umumnya, autokorelasi banyak terjadi pada data time series, meskipun dapat juga terjadi pada data *cross-section*. Hal ini disebabkan karena pada data time series observasi diurutkan menurut waktu secara kronologis, sehingga besar kemungkinan akan terjadi autokorelasi antar observasi, atau dengan kata lain nilai observasi akan dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Salah satu cara untuk melihat *white noise* dapat diuji melalui *Correlogram ACF* dan *PACF* dari residual. Bila ACF mengindikasikan residual

white noise artinya model sudah cocok, sebaliknya maka model tidak cocok. Untuk mengetahui stabil dan ada tidaknya autokorelasi di dalam model dapat dilihat dari probabilitasnya lebih besar dari 0.5.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Masalah heteroskedastisitas timbul apabila variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan (Gujarati, 2012). Ketentuan dari Uji Heteroskedastisitas yaitu:

1. Apabila nilai dari probabilitas dari chi-square > 0,05 ($\alpha = 5\%$), dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai dari probabilitas chi-square < 0,05 ($\alpha = 5\%$), dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Stabilitas Model ARDL

Uji stabilitas model ARDL dalam penelitian ini menggunakan uji CUSUM dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji CUSUM untuk model ARDL dalam penelitian ini. Stabilitas model ditentukan dari posisi CUSUM line yang berwarna biru berada diantara dua significance line 5% yang berwarna merah.

Estimasi ARDL

Model ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) adalah pengaruh variabel X dan Y dari waktu ke waktu termasuk pengaruh variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y masa sekarang (Zaretta & Yovita, 2019). Penelitian ini menggunakan spesifikasi model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Adapun model umum model umum dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$\Delta PE_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_1 \Delta LNPD_{t-1} + \sum_{i=0}^n \beta_1 \Delta LNBT_{t-1} + \sum_{i=0}^n \beta_1 \Delta LNBS_{t-1} + \mu_t$$

Ket:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PD : Pembiayaan Daerah

BTT : Belanja Tidak Terduga

BS : Belanja Subsidi

β_0 : Nilai Konstan

n : Ukuran Sampel

t : Waktu Sampel

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Model ARDL

μ_t : *Disturbance error* (*white noise*)

LN : Invers logaritma natural

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioner

Tabel 4.1 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Unit Root	ADF Test	Critical Value	ADF	Keterangan
LNPermubuhan Ekonomi	Level	-4.077958	-2.960411	0.0035	Stasioner
	First Difference	-3.893928	-2.976263	0.0063	Stasioner
LNPerubahan Daerah	Level	-2.045789	-2.960411	0.2669	Tidak Stasioner
	First Difference	-5.319090	-2.963972	0.0001	Stasioner
LNBelanja Tidak Terduga	Level	-1.807448	-2.960411	0.3701	Tidak Stasioner
	First Difference	-6.555309	-2.622989	0.0000	Stasioner
LNBelanja Subsidi	Level	-1.251568	-2.960411	0.6389	Tidak Stasioner
	First Difference	-4.970498	-2.963972	0.0004	Stasioner

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini secara keseluruhan stasioner pada tingkat *first difference* dengan nilai $prob < 0.05$. Artinya penggunaan metode ARDL dalam penelitian ini layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Penentuan Lag Optimum

Tabel 4.2 Hasil Penentuan Lag Optimum

	Mean dependent	
R-squared	0.186068	var 3.30E-15
Adjusted R-squared	-0.139505	S.D. dependent var 2.456381
S.E. of regression	2.622127	criteraion 5.014975
Sum squared resid	137.5110	Schwarz criterion 5.439308
Log likelihood	-63.71714	criteraion 5.147871
F-statistic	0.571510	Durbin-Watson stat 2.181097
Prob(F-statistic)	0.788888	

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata nilai model *Akaike Info Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion* (SC), *Hanna-Quin Criter* (HQC) berkisar pada lag 5 (*Automatic selection*). Dengan demikian panjang lag yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5.

Uji Kointegrasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: No levels relationship				
F-Bounds Test				
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)

Finite Sample: n=30

F-statistic	9.946795	10%	2.676	3.586
k	3	5%	3.272	4.306
		1%	4.614	5.966

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 pengujian kointegrasi dengan menggunakan pendekatan *bound test* baik pada taraf kepercayaan 10%, 5% maupun 1% menunjukkan terjadinya kointegrasi di mana nilai F-statistik sebesar $9,94 > I(0)$ dan $I(1)$.

Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.286040	Prob. F(2,20)	0.1276
Obs*R-squared	5.395975	Prob. Chi-Square(2)	0.0673

Sumber: Data diolah, 2023

Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai hasil Prob *Chi-Squared* $0.0673 > 0.05$, menandakan data sudah valid dan tidak terindikasi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

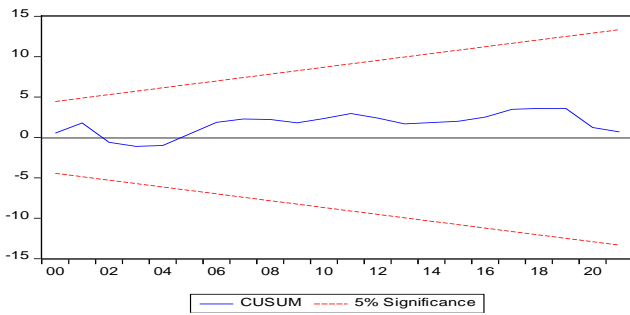
F-statistic	3.487734	Prob. F(27,1)	0.4033
Obs*R-squared	28.69528	Prob. Chi-Square(27)	0.3758
Scaled explained SS	21.31978	Prob. Chi-Square(27)	0.7711

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hasil $obs * R-squared < X^2$ pada $df(27) = 40.11$ artinya $28.69 < 40.11$ dengan nilai probabilitas (P-value) sebesar $0.37 > 0.05$ data model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Stabilitas

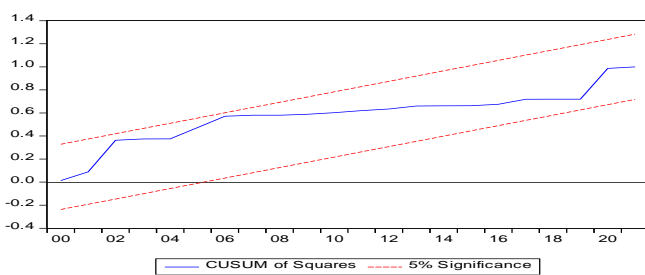
Gambar 4.1 Uji Stabilitas Pengujian CUSUM



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 4.1 hasil pengujian CUSUM Test dapat dijelaskan yaitu plot kuantitas W_r tidak berada di atas garis batas pada tingkat signifikan 5%, plot tersebut membentuk suatu garis linier.

Gambar 4.2 Uji Stabilitas ARDL (CUSUMQ)



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 4.2 hasil pengujian CUSUMQ dapat dijelaskan bahwa plot kuantitas S_r tidak berada di atas garis batas tingkat signifikan 5%, plot tersebut membentuk suatu garis linier. Berdasarkan hasil kedua uji stabilitas model di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien hasil regresi bersifat stabil secara keseluruhan.

Hasil Estimasi Model ARDL

Tabel 4.6 Estimasi ARDL Jangka Pendek

ECM Regression				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(INBS)	-1.973091	0.554651	-3.557354	0.0021
D(INBS(-1))	-1.397458	0.535440	-2.609924	0.0172
D(INBS(-2))	-2.793091	0.642760	-4.345462	0.0003
D(INBS(-3))	1.583607	0.625392	2.532185	0.0203
CointEq(-1)*	-1.057983	0.175182	-6.039328	0.0000

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.6 merupakan formulasi uji jangka pendek dengan hasil sebagai berikut:

$$\Delta PE_t = -1,973\Delta INBS_t - 1,397\Delta INBS_{(t-1)} - 2,793\Delta INBS_{(t-2)} + 1,583\Delta INBS_{(t-3)} - 1,058 \text{ Ect} (-1)$$

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai $CointEq(-1)$ -1,058 dan signifikan pada level 1% artinya jika terjadi guncangan atau *shock* maupun perubahan, maka

akan terjadi keseimbangan dengan kecepatan 1,06 tahun baru akan kembali stabil. Karena nilai $CointEq(-1)$ 1,06 yang berarti untuk mencapai keseimbangan dalam model ini jika terjadi guncangan dapat di seimbangkan dengan kecepatan 1,06 tahun.

Belanja subsidi pada lag 0 memiliki nilai koefisien sebesar -1,973. Artinya kenaikan belanja subsidi sebesar 1% pada tahun berjalan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berjalan sebesar 1,97 persen. Nilai probabilitas variabel ini sebesar $0.0021 < 0.05$, artinya variabel ini signifikan pada level 1%.

Koefisien belanja subsidi pada 1 tahun sebelumnya memiliki nilai sebesar -1,397. Artinya kenaikan belanja subsidi Indonesia 1 tahun sebelumnya sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berjalan sebesar 1,39 persen. Nilai probabilitas variabel ini sebesar $0.0172 < 0.05$, artinya variabel belanja subsidi pada Lag 1 signifikan pada level 5%.

Variabel belanja subsidi pada 2 tahun sebelumnya memiliki nilai koefisien sebesar -2,793. Artinya kenaikan belanja subsidi Indonesia 2 tahun sebelumnya sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berjalan sebesar 2,79 persen. Nilai probabilitas variabel ini sebesar $0.0003 < 0.01$ artinya variabel belanja subsidi signifikan pada level 1%.

Hasil dalam estimasi pada 3 tahun sebelumnya memiliki nilai koefisien belanja subsidi sebesar 1,583. Artinya kenaikan belanja subsidi Indonesia 3 tahun sebelumnya sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berjalan sebesar 1,58 persen. Nilai probabilitas variabel ini $0.0203 < 0.05$, artinya variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Estimasi Model ARDL Jangka Panjang

Tabel 4.7 Estimasi ARDL Jangka Panjang

Levels Equation				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INPD	1.292373	1.051691	1.228853	0.2341
INBTT	-0.069487	0.611322	-0.113667	0.9107
INBS	-0.938918	0.807442	-1.162831	0.2593
C	1.389590	8.037356	0.172891	0.8646

$$EC = PE - (1.2924*INPD - 0.0695*INBTT - 0.9389*INBS + 1.3896)$$

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian model jangka panjang dengan ARDL pada Tabel 4.7 di atas mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$PE = 1,389 + 1,292 \text{ INPD} - 0,069 \text{ INBTT} - 0,938 \text{ INBS}$$

Nilai konstanta sebesar 1,389 yang artinya apabila PD, BTT, dan BS bernilai konstan dalam jangka panjang, maka jumlah pertumbuhan ekonomi juga akan konstan sebesar 1,38 persen.

Koefisien variabel pembiayaan daerah adalah 1,29, artinya apabila pembiayaan daerah meningkat sebesar 1% maka jumlah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan meningkat sebesar 1,29 persen. Pembiayaan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas pembiayaan daerah $0.234 > 0.05$.

Koefisien belanja tidak terduga memiliki nilai sebesar -0,06, artinya apabila belanja tidak terduga meningkat sebesar 1% maka jumlah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan meningkat sebesar 0,06 persen. Belanja tidak terduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas belanja tidak terduga $0.911 > 0.05$.

Koefisien belanja subsidi memiliki nilai sebesar 0,93, artinya apabila belanja subsidi meningkat sebesar 1% maka jumlah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan meningkat sebesar 0,93 persen. Belanja subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas belanja subsidi $0.865 > 0.05$.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dalam jangka pendek, dari hasil estimasi model ARDL variabel pembiayaan daerah tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang pembiayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena nilai probabilitas $0.234 > 0.05$. Artinya, kenaikan pembiayaan daerah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kementrian Keuangan RI menyatakan bahwa belanja daerah untuk belanja pegawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2019 tercatat sebesar 43,67 persen dari belanja daerah untuk belanja pegawai. Kemudian, pada tahun 2020 tercatat sebesar 44,20 persen, satu tahun berikutnya tercatat sebesar 46,28 persen. Artinya, sebagian besar dan kebanyakan belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sementara, belanja pegawai tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Keuangan, n.d. 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihsan (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Pembiayaan” terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Eliza (2015) dengan judul “Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat” yang menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Monteiro & Turnovsky (2008), yang menyimpulkan bahwa pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di India.

Pengaruh Belanja Tidak Terduga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dalam jangka pendek, dari hasil estimasi model ARDL variabel belanja tidak terduga tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang, belanja tidak terduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena nilai prob $0.910 > 0.05$. Artinya, apabila belanja tidak terduga meningkat dalam jangka panjang maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dapat disebabkan karena belanja daerah untuk belanja tidak terduga jumlahnya relatif kecil. Badan Pengawasan Keuangan menyampaikan bahwa besaran belanja tidak terduga sifatnya tidak konstan. Besaran anggaran ditentukan berdasarkan kondisi bencana yang terjadi dan penggunaannya fokus pada keadaan darurat yang kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan output perekonomian (Keuangan, n.d. 2017). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi (2020), yang menunjukkan hasil bahwa belanja tidak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Thoyib & Fithri (2022) yang menunjukkan bahwa belanja tidak terduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Haryanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Belanja Tidak Terduga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

belanja tidak terduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Variabel belanja subsidi dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan nilai prob $0.0021 < 0.05$. Artinya, apabila dalam jangka pendek belanja subsidi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Pada Lag 1 variabel belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0.0172 < 0.05$. Artinya, apabila belanja subsidi meningkat pada 1 tahun sebelumnya, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Selanjutnya, pada Lag 2 variabel belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0.0003 < 0.05$. Artinya, apabila belanja subsidi meningkat pada 2 tahun sebelumnya, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Kemudian, pada Lag 3 variabel belanja subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai prob $0.0203 < 0.05$. Artinya apabila belanja subsidi meningkat pada 3 tahun sebelumnya maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.

Hasil pada Lag 3 penelitian ini sejalan dengan penelitian Bachtiar *et., al* (2015) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan belanja pemerintah pusat, pembayaran bunga utang, dan subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka panjang, belanja subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena nilai prob $0.938 > 0.05$. Artinya apabila belanja subsidi meningkat dalam jangka panjang, maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hal ini dapat disebabkan karena peran belanja subsidi terhadap peningkatan output tidak sebesar peran belanja modal karena *multiplier effect* (efek berganda) belanja subsidi lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal. Badan Kebijakan Fiskal menyatakan bahwa, normalnya anggaran belanja modal lebih besar dibanding belanja subsidi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir belanja subsidi meningkat sementara belanja modal cenderung menurun. Belanja subsidi pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp216,8 triliun, tahun 2019 tercatat sebesar Rp201,8 triliun

kemudian satu tahun berikutnya tercatat sebesar Rp196,2 triliun. Sedangkan belanja modal pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp184,1 triliun, tahun 2019 sebesar Rp177,8 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp190,9 triliun (Keuangan, n.d. 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Alshahrani & Alsadiq (2014) dengan judul "*Impact of Government on Nigeria's Economic Growth (1992-2011)*". Penelitian tersebut menyimpulkan belanja subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Wulandari (2020), yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur, subsidi, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2018.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam jangka pendek, pembiayaan daerah tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang, pembiayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya apabila, dalam jangka panjang pembiayaan daerah meningkat maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Dalam jangka pendek, belanja tidak terduga tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang, belanja tidak terduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya apabila, dalam jangka panjang belanja tidak terduga meningkat maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Dalam jangka pendek, pada Lag 0 belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya apabila, belanja subsidi meningkat dalam jangka pendek maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Lag 1 dan Lag 2 belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, apabila belanja subsidi meningkat dalam jangka pendek akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pada Lag 3, belanja subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, apabila

belanja subsidi meningkat dalam jangka pendek akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam jangka panjang variabel belanja subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, apabila belanja subsidi meningkat dalam jangka panjang tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian maka diajukan beberapa saran yaitu:

1. Diperlukan optimalisasi, inisiatif, dan kreatifitas aparat pelaksana keuangan agar pembiayaan daerah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Terkait dengan belanja tidak terduga, diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaan sehingga meminimalisir kendala yang dihadapi dalam penyerapannya. Selain itu, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat harus merujuk pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan peraturan Presiden sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan.
3. Diharapkan agar pemerintah melakukan pengawasan yang lebih baik, cermat dan ketat terhadap belanja subsidi agar penggunaannya dapat optimal, tepat sasaran, tepat penggunaannya sesuai dengan peruntukan subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshahrani, S., & Alsadiq, A. (2014). Economic Growth and Government Spending in Saudi Arabia: an Empirical Investigation. *IMF Working Papers*, 14(3), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484348796.001>.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>.
- Bachtiar, H. F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S. Y. (2015). *Pembayaran Bunga Utang , dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1999-2013*. 682–688.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pekbis*, 1(1), 200–210.
- Gujarati, D., N. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika (Terjemahan Mangunsong)*. Salemba empat.
- Haryanto, T. (2013). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Publik Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–12.
- Hidayat, R. (2010). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Keputusan Inverstasi & Financial Empiris (Study pada Bursa Efek Indonesia)* Penerbit, Salemba Empat.
- Ihsan, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*. 5(2).
- Jhingan M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas (*Decentralization Fiscal Consolidation through Policy Reform of Local Quality Spending*). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 15–28.
- Kuangan, B. P. (n.d.). *Laporan realisasi APBN. 2013*.
- Kuangan, B. P. (n.d.). *Laporan realisasi APBN. 2017*.
- Kuangan, B. P. (n.d.). *Laporan realisasi APBN. 2020*.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Ketiga. In Jakarta: Erlangga.
- Monteiro, G., & Turnovsky, S. J. (2008). The Composition of Productive Government Expenditure: Consequences For Economic Growth and Welfare. *Indian Growth and Development Review*, 1(1), 57–83. <https://doi.org/10.1108/17538250810868134>.
- Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5, No.9.
- Spencer, M. H. (2000). *Contemporary Economics*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal*

- Media Riset Akuntansi*, 01(02), 109–124.
- Thoyib, M., & Fithri, E. J. (2022). *Pengaruh Belanja Bantuan Sosial , Belanja Tidak Terduga , Belanja Barang Dan Jasa , Dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan Bantuan Sosial , Belanja Tidak Terduga , Belanja Barang dan Jasa , d. 2(3), 5–11.*
- Todaro, M. (2012). *PembangunanEkonomidiDunia Ketiga*(Edisi ke3). Jakarta,Erlangga.
- Veithzal, Rivai. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan .PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.*
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 103–113.*
- Widyatama, A. (2022). *Dua Sisi Impresi Subsidi.*
- Wulandari, N. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2009-2018. File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKE P_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRI NT.Docx, 21(1), 1–9.*
- Zaretta, B., & Yovita, L. (2019). *Model Autoregressive Distributed Lag (Ardl). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 9–22. https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i1.2318.*